

BAB V

KESIMPULAN

K.H. Ahmad Dahlan dilahirkan pada tahun 1869 di Kauman Yogyakarta dan wafat pada jumat malam 7 Rajab tahun 134 Hijriyah (23 Februari 1923) dalam usia 55 tahun. K.H. Ahmad Dahlan adalah anak ke empat dari tujuh bersaudara. Ayahnya bernama Kyai Haji Abu Bakar bin Kyai Sulaiman, ibunya bernama Siti Aminah. K.H. Ahmad Dahlan lahir dalam suatu lingkungan keislaman yang kukuh. Hal ini diperkuat lagi dengan lingkungan tempat K.H. Ahmad Dahlan lahir dan dibesarkan yaitu kampung Kauman. Kampung Kauman seperti kebanyakan bagian Yogyakarta yang lain merupakan basis yang kuat bagi kaum santri. K.H. Ahmad Dahlan secara dini mendapat pendidikan dari ayahnya sendiri. Dua kali berangkat ke Mekkah K.H. Ahmad Dahlan untuk melaksanakan haji dan memperdalam ilmu agama di Mekkah. Perjumpaannya dan dialog dengan Rasyid Ridha ini memberikan pengaruh yang kuat terhadap pemikiran K.H. Ahmad Dahlan.

Kebijakan politik pemerintah Hindia Belanda terhadap Islam tidak bisa dilepaskan dari kondisi dan situasi pada awal abad 20. Sejak kekuasaan kolonial Belanda, berbagai gerakan dan pemberontakan di Hindia Belanda bermunculan. Pemberontakan tersebut dimotori oleh para haji dan ulama. Situasi ini erat kaitannya dengan para haji yang melakukan ibadah haji di Mekkah. Sehingga membuat khawatir pemerintah Hindia Belanda akan adanya ide-ide perang jihad dan Pan Islamisme yang diperoleh di Mekkah. Oleh karena itu untuk lebih membatasi ruang gerak islam dikeluarkan ordonansi haji dan guru. Dimana

ordonansi tersebut bertujuan menghambat masuknya paham-paham Pan Islamisme yang akan di bawa oleh para haji.

Secara garis besar bisa dikatakan bahwa gerakan politik K.H. Ahmad Dahlan terhadap pemerintah Hindia Belanda bercorak “Rival-Moderat”. Se jauh penelusuran peneliti, tidak ditemukan sama sekali bahwa adanya ucapan-ucapan atau pun tulisan-tulisan secara terang-terangan menentang pemerintah Hindia Belanda. Hal ini bukan berarti K.H. Ahmad Dahlan memihak Belanda. Meski secara lisan ia tidak mengecam Belanda namun gerakannya berorientasi pada kesejahteraan sosial dan peningkatan sumber daya manusia jelas merupakan bukti usahanya melawan penjajahan. Jelas sekali terlihat dari berbagai gerakan politik K.H. Ahmad Dahlan yang terkesan “menghormati” keberadaan pemerintah Hindia Belanda. Sehingga secara politis K.H. Ahmad Dahlan tidak pernah dibatasi gerakannya oleh pemerintah dan keberadaan Muhammadiyah tidak menjadi ancaman bagi pemerintah.

Meski tidak setuju dengan adanya penjajahan, perjuangan K.H. Ahmad Dahlan tidak diwujudkan dalam perlawanan fisik. Dalam batas-batas tertentu K.H. Ahmad Dahlan “mengakui” kekuasaan Belanda. Hal tersebut cukup realistis bagi K.H. Ahmad Dahlan untuk tidak memberikan perlawanan terhadap Belanda secara langsung. Dalam usaha mendirikan Muhammadiyah, K.H. Ahmad Dahlan terkesan mengakui keberadaan Belanda, hal itu dengan tujuan adanya usaha untuk mendapatkan izin gerakan Muhammadiyah. Meski berusaha meningkatkan taraf hidup masyarakat pribumi, namun secara formal gerakannya sebisa mungkin tidak mendapatkan rintangan dari pemerintah Hindia Belanda.

Sehingga izin pendirian Muhammadiyah diperjuangkan oleh K.H. Ahmad Dahlan dengan bantuan pimpinan Budi Utomo yang dekat dengan pemerintah Hindia Belanda. Usaha memperjuangkan legalitas gerakan ini berlangsung dalam tiga tahapan. Tahap pertama menghasilkan ruang gerak seluas residensi Yogyakarta. Tahap kedua menghasilkan izin ruang gerak seluas daerah kekuasaan Hindia Belanda dan tahap ketiga pendirian cabang-cabang Muhammadiyah di manapun di daerah kekuasaan Hindia Belanda.

Kemudian penerbitan ordonansi guru yang bersifat politis, yang bertujuan untuk melakukan kontrol atas lembaga pendidikan yang dicurigai sebagai ancaman potensial terhadap pemerintah.. Tahun 1921 Fachroddin sebagai utusan K.H. Ahmad Dahlan membahas persoalan tersebut dalam Kongres al-Islam di Cirebon. Berbagai masalah dalam penyelenggaraan haji oleh Hindia Belanda membuat kecewa umat Islam. K.H. Ahmad Dahlan menuntut Kongsi Tiga, supaya mengadakan perbaikan-perbaikan, penertiban pelayaran di atas kapal. *Hoofdbestuur* Muhammadiyah mengutus anggotanya, K.H. M. Sudjak dan M. Wirjopertomo ke Mekkah untuk meninjau dan mempelajari masalah yang menyangkut perjalanan haji. Wadah gagasan perbaikan, penertiban haji ini diwujudkan pertama kali dalam badan yang disebut penolong haji (PH) di bawah pimpinan K.H. Ahmad Dahlan.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip :

Anggaran Dasar Muhammadiyah 1912

Anggaran Dasar Muhammadiyah 1914

Anggaran Dasar Muhammadiyah 1921

EXTRACT uit het Register den Besluiten van de Gouverneur General van Nederlandsch-Indie. Buitenzorg, den 22 sten Augustus 1914, No. 81.

UITREKSEL, uit het Register den Besluiten van de Gouverneur General van Nederlandsch-Indie. Batavia, den 16 Augustus 1920, No. 40.

UITREKSEL, uit het Register den Besluiten van de Gouverneur General van Nederlandsch-Indie. Batavia, den 2 September 1921, No. 36.

Buku :

Abdul Haris Ma'moen. *Mengenal Sepetik Riwayat K.H. Ahmad Dahlan*. (PWM Muhammadiyah Kodya Tegal. 1985).

Abdul Munir Mulkhan, *Etika Welas Asih dan Reformasi Soaial Budaya Kyai Ahmad Dahlan* (Jakarta: Bentara, Kompas, 2005).

_____, *Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah Dalam Perspektif Perubahan Sosial*, (Jakarta : Penerbit Bumi Aksara. 1990).

Abu Mujahid, *Sejarah Muhammadiyah: Gerakan "Tajdid" di Indonesia bagian I*. (Bandung: Too Bagus Publishing, 2013).

Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

_____, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2001).

Achmad Jainuri, *Gerakan Reformasi Islam DI Jawa Pada Awal Abad Kedua Puluh*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1981).

_____, *Ideologi Kaum Reformis* (Surabaya: LPAM, 2002).

Achmad Taqiyudin et.al., *Antara Mekkah dan Madinah* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009).

Adi Nugroho, *K.H. Ahmad Dahlan: Biografi Singkat 1869-1923*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010).

Ahmad Adaby Darban, “Peranan Islam dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia”, dalam *Majalah Pembaharuan*, Edisi 1, (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 1985).

———, *Sejarah kauman: Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah*, (Yogyakarta, Tarawang, 2000). 13.

Ahmad Faizin Karimini, *Pemikiran dan Perilaku Politik K.H. Ahmad Dahlan*, (Gresik : MUHI Press, 2012).

Alfian, *Politik Kaum Modernis: Perlawanan Muhammadiyah terhadap Kolonialisme Belanda*, (Jakarta: al-Wasat, 2010).

———, *Islamic Modernism in Indonesia Politics; the Muhammadiyah Movement the Dutch Colonial Period 1912-1942*, (Universitas Wisconsin, 1969).

———, *Muhammadiyah: The Political Behaviour of a Muslim Modernist-Organization Under Dutch Colonialism*. (Yogyakarta : UGM Press. 1989).

Alwi Shihab, *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, Cet. Pertama, (Bandung: Mizan, 1998).

Amir Sutarga, *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1987).

Amir Syarifuddin, *Garis–Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Media Group, 2012).

Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*. (Jakarta: LP3ES, 1985).

Arbiah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1989).

Asmuni, Yusran ,M, . *Aliran Modern Dalam Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas,1982).

Azumardi Azra, *Esei-esei Intelektual Muslim Pendidikan dan Islam* (Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 1998).

Benda, Harry J., *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, Terj. Daniel Dhakidae (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1980).

Daliman, A, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta : Ombak, 2012).

- Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*. (Jakarta: Rajawali, 1983).
- _____, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1996).
- Departemen Agama RI, *Bunga Rampai Perhajian II*, (T.t, 2001).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Peranan Elit Agama Pada Masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2000).
- Djumhur, *Sejarah Pendidikan*, (Bandung : CV ILMU, 1994).
- Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).
- Elsbeth Locher Scholten, *Etika yang Berkeping-keping*. Terj.Nicolette P. Ratih, (Jakarta: Djambatan, 1996).
- Haedar Nashir, *Meneguhkan Ideologi Gerakan Muhammadiyah*, (Malang: UMM Press, 2006).
- _____, *Muhammdiyah Abad Kedua*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011).
- Haidar, M. Ali, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fiqih dalam Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995).
- Hasan Sadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*. (Jakarta: Bina Aksara, 1983).
- Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996).
- Hefner, Robert W. dkk, *Api Pembaharuan Kiai Ahmad Dahlan*, (Yogyakarta : Multi Pressindo, Maret 2008)., Cet. Ke-I.
- Helius Syamsudin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta : Ombak, 2007).
- Hurgronje, *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje Jilid VIII*, Terj. Soedarso Soekarno (Jakarta: INIS, 1993).
- Ibnu Qoyim Ismail, *Kiai Penghulu Jawa: Peranannya di Masa Kolonial*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).
- Jajat Burhanudin, *Ulama Perempuan Indonesia*, (Jakarta : PT. Gradmedia Pustaka, 2002).

Junus Salam, *Gerakan Pembaharuan Muhammadiyah*, (Tangerang: Al-Wasat Publising House, 2009).

_____, *Riwayat Hidup KH. Ahmad Dahlan*, (Yogyakarta: TB Yogya, 1968).

Jurusan Pendidikan Sejarah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi*. (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah, FISE UNY, 2006).

Karel A. Steenbreink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dan Kurun Modern*, (Jakarta: LP3ES, 1986).

_____, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke 19*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).

Luois Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto (Jakarta : UI Press, 1985).

M. Dien Majid, *Berhaji Di Masa Kolonial*, (Jakarta: CV Sejahtera, 2008).

M. Nasruddin Anshoriy Ch, *Matahari Pembaharuan : Rekam Jejak K.H. Ahmad Dahlan*, (Yogyakarta : Yogya Bangkit Publisher, 2010).

Majelis Diktilitbang dan LPI PP Muhammadiyah, *1 Abad Muhammadiyah - Gagasan Pembaharuan Sosial Keagamaan*. (Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2010).

Mansur, dkk, *Rekontruksi Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Depag, 2005).

Muhammad Damami, *Akar Gerakan Muhammadiyah* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000).

Muhammad Ilyas Abdul Ghani, *Sejarah Kota Mekah Klasik dan Modern*, (Jakarta: AKBAR, 2003).

Muhammad Sirozi, *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-tokoh Islam dalam Penyusunan UU Nomor 2/1989*, Terj. Lillian D.T., (Jakarta: INIS, 2004).

Muhammad Soedja', *Cerita Tentang Kiyai Haji Ahmad Dahlan*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1993).

Mukhlis Paeni & Tim Penyusun. *Biro Perjalanan Haji Di Indonesia Masa Kolonial: Agen Herklots dan Firma Alsegooff & Co.*(ANRI:Jakarta, 2001).

Mursyidi Mr Sumuran Harahap, *Lintasan Sejarah Perjalanan Haji Indonesia*, (Jakarta: MARS-26, 1984).

- Musthafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam, dalam Perspektif Historis dan Ideologis* (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam, 2003).
- Nieuwenhuys, R., "Melalui Cermin Seni Sastra", dalam H. Baude dan I.J. Brugmans (peny.), *Balans van Beleid, Terugblik op de Laatste halve eeuw van Nederlandsch-Indie*, terj. Amir Sutaagra, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1987).
- Nur Achmad dan Pramono Utanthowi, *Muhammadiyah Digugat* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2000).
- Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren: sebuah Potret Perjalanan*, Cet. Pertama, (Jakarta: Paramadina, 1997).
- Pijper. G.F., "Politik Islam Pemerintah Belanda", dalam *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*, ed. H. Baudet dan I.J. Brugmans (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987).
- Porwo Martani, *Aku Mengenal Pahlawan Bangsa*, (Jakarta: Talenta Media Utama, 2008).
- Priyono, AE (ed)., *Paradigma Islam – Interpretasi Untuk Aksi : Kuntowijoyo*, (Bandung : Mizan Media Utama, 2008).
- Ricklefs, M.C, *Sejarah Modern Indonesia*. Terj. Drs. Dharmono Hardjowidjono, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press. 1991).
- _____, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, (Jakarta : Serambi, 2005).
- Ridjaluddin, H. *Muhammadiyah dalam Tinjauan Filsafat Islam*, (Jakarta: Pusat Kajian Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, 2011).
- Robert Van Niel, *Munculnya Elit Modern Indonesia*. Terj. Yayasan Ilmu-ilmu Sosial. (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1984).
- Saefur Rochmat, *Ilmu Sejarah Dalam Perspektif Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009).
- Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993).
- Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888: Kondisi, Jalan Peristiwa dan Kelanjutannya*, Terj. Hasan Basari, (Jakarta: YIIS bekerjasama dengan Pustaka Jaya, 1984).
- _____, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta : Gramedia, 1983).

- _____, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999).
- Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, (Yogyakarta: Lkis, 2007).
- Sjoedja', H.M., Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah versi Baru," eds Syaifullah dan Musta (Manuskrip, 1995).
- Soekarso ,dkk, *Teori Kepemimpinan*, (Jakarta : Mitrawacanamedia, 2010).
- Suradi, *Haji Agus Salim dan Konflik politik dalam Sarekat Islam*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997).
- Suwarno, *Muhammadiyah Sebagai Oposisi*, (Yogyakarta: UII Press, 2001).
- Suwendi, *Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Syaifullah, *Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997).
- Syarifuddin Jurdi, *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010).
- Tim Pembina AL- Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Malang, *Muhammadiyah Sejarah, Pemikiran dan Amal Usaha*. (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 1990).
- Tim Prodi Ilmu Sejarah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta : Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2013).
- Toto Suharto, *Filsafat Pendidikan Islam* (Yogyakarta: AR-Ruzz Media, 2007).
- Weinata Sairin, *Gerakan Pembaharuan Muhammadiyah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).
- Yusuf Abdullah Puar, *Perjuangan dan Pengabdian Muhamadiyah*, (Jakarta : Pustaka Antara, 1989).
- Zuhairini, dkk. *Sejarah Pendidikan Islam*. (Jakarta : Penerbit Bumi Aksara. 1986).
- Zuli Qodir, dkk. *Ijtihad politik Muhammadiyah : Politik Sebagai Asmaul Husna*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015).

Jurnal :

Ali Mufrodi, *Haji Indonesia dalam Perspektif Historis*. Disampaikan dalam Peresmian Jabatan Guru Besar Sejarah Kebudayaan Islam pada Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003.

Farid Setiawan, “Kebijakan Pendidikan Muhammadiyah terhadap Ordonansi Guru”, *Jurnal Pendidikan Islam* : Volume III, Nomor 1, Juni 2014 52.

Hikmawan Syahputra, “Peran Politik Muhammadiyah Tahun 2010-2014”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, (Malang : Universitas Brawijaya Malang, 10 September 2014)..

Husain Haikal, “Dinamika Muhammadiyah Menuju Indonesia Baru”, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, (No. 25, th ke-6, September 2000)..

———, “Sayap Pembaharu & Tradisional Islam (Mitos atau Realitas?).”, *Al-Jami'ah*, (No. 2, Vol. 38, Tahun 2000).

K. Subroto, “Strategi Snouck Mengalahkan Jihad di Nusantara”, *SYAMINA*, Edisi 1 / Januari 2017.

Leny Marlina, “Kajian Terhadap Perkembangan Sekolah Muhammadiyah”, *TA'DIB*, Vol. XVII, No. 01, Edisi Juni 2012.

Martin van Bruenessen, “Mencari Ilmu dan pahala di Tanah Suci”, *Ulumul Qur'an*, (Jakarta, No. 5 Voll. II. 1990).

Noor Huda, Perkembangan Institusi Sosial-Politik Islam Indonesia Sampai Awal Abad XX, “*ADDIN*”, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015.

Rubrik Bingkai pada suara Muhammadiyah edisi 24/TH. Ke-94 16-31 Desember 2009.

Siti Muflikhatul Hidayah, “Citra Muhammadiyah sebagai Gerakan Anti Misi Kristen Indonesia”, *Tajdida*, Vol. 9, No. 2, Desember 2011.

Sumarno, “Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia (Studi Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan).”, *AL MURABBI*, (Ngawi : STIT Muhammadiyah Tempurrejo Ngawi, 2017)., Vol.3, No. 2 230.

Yudha, Pengaruh Haji Terhadap Politik Islam di Indonesia (Tahun 1900-1945)., “*THAQAFIYYAT*”, Vol. 16, No. 1, Juni 2015.

Zainal Abidin, “Menapaki Distingsi Geneologis Pemikiran Pendidikan (Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama)., *NIZHAM*, Vol. 4, No. 2 Juli - Desember 2015.

Zainal, *Dakwah Jama'ah Haji Nusantara Dari Masa Ke Masa*, artikel tanpa tahun dan tempat.

Zulfa Ahmad, "Perhajian Di Abad-19 dan Awal Abad-20 Serta Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia", *AT-TA'LIM*; Vol. 3, Tahun 2012.

Skripsi :

Ahmad Fauzan Baihaqi, "Transportasi Jamaah Haji di Embarkasi/Debarkasi Pelabuhan Batavia Tahun 1911-1930", *Skripsi*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

Aji Digdaya, "Peran Muhammadiyah Dalam Pergerakan Di Yogyakarta 1912-1945", *Skripsi*, (Yogyakarta : UNY, 2012).

Annisa Triana, "Peran Muhammadiyah Dalam Bidang Politik Di Yogyakarta Tahun 1945-1968", *Skripsi*, (Yogyakarta : UNY, 2014).

Miftahul Jannah, "Politik Hindia Belanda Terhadap Umat Islam Indonesia", *Skripsi*, (UIN Sunan Ampel Fakultas Adab dan Humaniora, Surabaya, 2014).

Nor Tofik, "Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan Dalam Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia", *Skripsi*, (Yogyakarta : UIN. 1992).

Yutandes Titin Rohmaenah, "Kampung Kauman Yogyakarta : Studi Tentang Perkembangan Muhammadiyah (1912-1923)", *Skripsi*, (Yogyakarta : UNY, 2010).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto K.H. Ahmad Dahlan



Sumber : Mustafa Kamal, dkk, Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam,
(Yogyakarta : Persatuan Yogyakarta, 1994)

Lampiran 2. Anggaran Dasar Muhammadiyah 1912.

STATUENT MUHAMMADIYAH

Artikel 1

Perhimpunan itu ditentukan buat 29 tahun lamanya, mulai 18 November 1912, namanya “Muhammadiyah” dan tempatnya di Yogyakarta.

Artikel 2

- a. Menyebarkan Igama Kanjeng Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam kepada penduduk Bumi Putra di dalam Residen Yogyakarta.
- b. Memajukan hal Igama kepada anggota-anggotanya.

Artikel 3

Perhimpunan itu hendaknya bersungguh-sungguh menyampaikan hajat nya dengan:

- a. Mendirikan dan memelihara atau membantu sekolah-sekolah yang diberi pengajaran hal permulaan ajaran agama Islam juga, lain dari pada ilmu-ilmu yang biasa diajarkan di sekolah.
- b. Mengadakan perkumpulan sekutu-sekutunya dan orang-orang yang suka datang, disitulahdibicarakan perkara-perkara agama Islam.
- c. Mendirikan dan memelihara atau membantu tempat sembahyang (Rumah-rumah wakaf dan masjid), yang dipakai melakukan agama buat orang banyak.
- d. Menerbitkan serta membantu terbitnya kitab-kitab, kitab khutbah, surat kabar, semuanya yang muat perkara ilmu agama Islam, ilmu ketertiban cara Islam.

Artikel 4

Sekutu biasa itu hanyalah orang-orang yang beragama Islam di residensi Yogyakarta saja. Supaya orang boleh menjadi sekutu, cukuplah jika ia melahirkan permintaannya saja kepada bestuur.

Orang berhenti daripada jadi sekutu, jika ia mintaberhenti atau jika dilepas oleh keputusan perkumpulan umum, yaitu menurut suara terbanyak.

Orang menjadi donateur jika ia suka menolong perhimpunan itu dengan memberi dana setidaknya sekurang-kurangnya f2,50 atau dengan dibayar sekali banyaknya f25,-

Artikel 5

Maka peperintahan perhimpunan itu ditangannya satu Hoofbestuur, banyaknya 9 anggota, yang dipilih dari anggotanya perhimpunan itu, yaitu : satu President, satu Vice Presiden, satu Secretaris nomer satu dan nomer dua, satu Thesaurier dan empat Comissaris.

Yang mulai menjadi anggota dari Hoofbestuur, yaitu :

1. M. Khetib Amin, Haji Ahmad Dahlan.
2. M. Pangulu, Abdoel Siraj.
3. R. Ketib Tjandana, Haji Ahmad.
4. Haji Abdul Rahman.
5. R. Haji Sarkawi.
6. M. Gebayan, Haji Mohammad.
7. R. Haji Djaelani.
8. Haji Akis (Anis)
9. M. Carik, Haji Mohammad Fakihi.

Artikel 6

Hoofbestuur dipilih dalam perkumpulan umum dengan suara yang sungguh-sungguh terbanyak. Lamanya jadi Hoofbestuur tiada lebih dari tiga tahun, serta berhenti bersama-sama, tetapi ketika itu juga boleh dipilih lagi.

Artikel 7

Jikalau didalam sebuah tempat di residensi Yogyakarta ada sekutu perhimpunan ini lebih dari 10 Orang, bolehlah disitu diadakan afdeeling perhimpunan itu, dikepalai oleh bestuur afdeeling itu sendiri.

Artikel 8

Segala keputusan dalam perkumpulan umum haruslah bergantung pada suara yang sungguh-sungguh lebih banyak diantara sekutu yang hadir dan memang berhak mempunyai suara. Keputusan itu haruslah dimaklum kepada segala sekutunya didalam tempo sebulan lamanya. Sebelum dibatalkan pula dalam perkumpulan umum, segala keputusan itu selalu ada kekuasaanya.

Artikel 9

Sarat perhimpunan itu yang berupa uang yaitu :

- a. Dari pada contributie sekutu biasa;
- b. Dari pada derma donateur;
- c. Dari pada harta pusaka, anugerah pemberian, dan mana-mana yang datangnya tiada disangka-sangka angka, dan:
- d. Dari pada keuntungan, yang timbul dari pada barang kepunyaan perhimpunan.

Artikel 10

Keputusan yang hendak mengubah statuent ini, supaya hendaklah ada suara yang lebih yaitu 3/4-nya segala sekutu yang hadir, lagi berhak mempunyai suara, serta datangnya itu memang dipanggil akan membicarakan perkara itu.

Artikel 11

Perhimpunan itu dipandang tiada lagi oleh pengadilan, jikalau sekutunya berkurang-kurang sampai tingga kurang dari pada duapuluh lima orang. Perhimpunan itu boleh diberhentikan pada sembarang waku asal hal itu diputuskan dalam perkumpulan umum dan yang setuju sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ -nya segala suara yang ada hadir pada waktu itu.

Artikel 12

Segala uang dan lain-lain kepunyaan perhimpunan itu, yang ada pada ketika perhimpunan itu diberhentikan, jatuh kepada wakaf-wakaf dan masjid-masjid, yaitu menurut bunyi Burgelijk awetboek Hindia Nederlan fasal 1665, yang akan diberi itu ditentukan oleh perkumpulan umum yang kemudian sekalai, yaitu yang memutuskan hal matinya perhimpunan itu.

Sumber : M.H. Djalan Badawi, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah 1912-1985*, Yogyakarta Sekretariat Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Lampiran 3. Anggaran Dasar Muhammadiyah 1914.

STATUENT MUHAMMADIYAH

Artikel 1

Perhimpunan itu ditentukan buat 29 tahun lamanya, mulai 18 November 1912, namanya “Muhammadiyah” dan tempatnya di Yogyakarta.

Artikel 2

Maksud Persyarikatan ini yaitu :

- a. Memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran Agama di Hindia Nederland, dan
- b. Memajukan dan menggembirakan kehidupan (cara hidup) sepanjang kemauan agama Islam kepada lid-lidnya.

Artikel 3

Perhimpunan itu hendaknya bersungguh-sungguh menyampaikan hajat nya dengan:

- a. Mendirikan dan memelihara atau membantu sekolah-sekolah yang diberi pengajaran hal permulaan ajaran agama Islam juga, lain dari pada ilmu-ilmu yang biasa diajarkan di sekolah.
- b. Mengadakan perkumpulan sekutu-sekutunya dan orang-orang yang suka datang, disitulah dibicarakan perkara-perkara agama Islam.
- c. Mendirikan dan memelihara atau membantu tempat sembahyang (Rumah-rumah wakaf dan masjid), yang dipakai melakukan agama buat orang banyak.
- d. Menerbitkan serta membantu terbitnya kitab-kitab, kitab khutbah, surat kabar, semuanya yang muat perkara ilmu agama Islam, ilmu ketertiban Islam.

Artikel 4

Sekutu biasa itu hanyalah orang-orang yang beragama Islam di residensi Yogyakarta saja. Supaya orang boleh menjadi sekutu, cukuplah jika ia melahirkan permintaannya saja kepada bestuur.

Orang berhenti daripada jadi sekutu, jika ia minta berhenti atau jika dilepas oleh keputusan perkumpulan umum, yaitu menurut suara terbanyak.

Orang menjadi donateur jika ia suka menolong perhimpunan itu dengan memberi dana setidaknya sekurang-kurangnya f2,50 atau dengan dibayar sekali banyaknya f25,-

Artikel 5

Maka peperintahan perhimpunan itu ditangannya satu Hoofbestuur, banyaknya 9 anggota, yang dipilih dari anggotanya perhimpunan itu, yaitu : satu President, satu Vice Presiden, satu Secretaris nomer satu dan nomer dua, satu Thesaurier dan empat Comissaris.

Yang mulai menjadi anggota dari Hoofbestuur, yaitu :

1. M. Khetib Amin, Haji Ahmad Dahlan.
2. M. Pangulu, Abdoel Siraj.
3. R. Ketib Tjandana, Haji Ahmad.
4. Haji Abdul Rahman.
5. R. Haji Sarkawi.
6. M. Gebayan, Haji Mohammad.
7. R. Haji Djaelani.
8. Haji Akis (Anis)
9. M. Carik, Haji Mohammad Faki.

Artikel 6

Hoofbestuur dipilih dalam perkumpulan umum dengan suara yang sungguh-sungguh terbanyak. Lamanya jadi Hoofbestuur tiada lebih dari tiga tahun, serta berhenti bersama-sama, tetapi ketika itu juga boleh dipilih lagi.

Artikel 7

Jikalau didalam sebuah tempat di residensi Yogyakarta ada sekutu perhimpunan ini lebih dari 10 Orang, bolehlah disitu diadakan afdeeling perhimpunan itu, dikepalai oleh bestuur afdeeling itu sendiri.

Artikel 8

Segala keputusan dalam perkumpulan umum haruslah bergantung pada suara yang sungguh-sungguh lebih banyak diantara sekutu yang hadir dan memang berhak mempunyai suara. Keputusan itu haruslah dimaklum kepada segala sekutunya didalam tempo sebulan lamanya. Sebelum dibatalkan pula dalam perkumpulan umum, segala keputusan itu selalu ada kekuasaanya.

Artikel 9

Sarat perhimpunan itu yang berupa uang yaitu :

- a. Dari pada contributie sekutu biasa;
- b. Dari pada derma donateur;
- c. Dari pada harta pusaka, anugerah pemberian, dan mana-mana yang datangnya tiada disangka-sangka angka, dan:
- d. Dari pada keuntungan, yang timbul dari pada barang kepunyaan perhimpunan.

Artikel 10

Keputusan yang hendak mengubah statuent ini, supaya hendaklah ada suara yang lebih yaitu 3/4-nya segala sekutu yang hadir, lagi berhak mempunyai suara, serta datangnya itu memang dipanggil akan membicarakan perkara itu.

Artikel 11

Perhimpunan itu dipandang tiada lagi oleh pengadilan, jikalau sekutunya berkurang-kurang sampai tingga kurang dari pada duapuluh lima orang. Perhimpunan itu boleh diberhentikan pada sembarang waku asal hal itu diputuskan dalam perkumpulan umum dan yang setuju sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ -nya segala suara yang ada hadir pada waktu itu.

Artikel 12

Segala uang dan lain-lain kepunyaan perhimpunan itu, yang ada pada ketika perhimpunan itu diberhentikan, jatuh kepada wakaf-wakaf dan masjid-masjid, yaitu menurut bunyi Burgelijk awetboek Hindia Nederlan fasal 1665, yang akan diberi itu ditentukan oleh perkumpulan umum yang kemudian sekalai, yaitu yang memutuskan hal matinya perhimpunan itu.

Sumber : M.H. Djalan Badawi, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah 1912-1985*, Yogyakarta Sekretariat Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

STATUENT MUHAMMADIYAH

Artikel 1

Perhimpunan itu ditentukan buat 29 tahun lamanya, mulai 18 November 1912, namanya “Muhammadiyah” dan tempatnya di Yogyakarta.

Artikel 2

Maksud Persyarikatan ini yaitu :

- a. Memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran Agama di Hindia Nederland, dan
- b. Memajukan dan menggembirakan kehidupan (cara hidup) sepanjang kemauan agama Islam kepada lid-lidnya.

Artikel 3

Perhimpunan itu hendaknya bersungguh-sungguh menyampaikan hajat nya dengan:

- a. Mendirikan dan memelihara atau membantu sekolah-sekolah yang diberi pengajaran hal permulaan ajaran agama Islam juga, lain dari pada ilmu-ilmu yang biasa diajarkan di sekolah.
- b. Mengadakan perkumpulan sekutu-sekutunya dan orang-orang yang suka datang, disitulah dibicarakan perkara-perkara agama Islam.
- c. Mendirikan dan memelihara atau membantu tempat sembahyang (Rumah-rumah wakaf dan masjid), yang dipakai melakukan agama buat orang banyak.
- d. Menerbitkan serta membantu terbitnya kitab-kitab, kitab khutbah, surat kabar, semuanya yang muat perkara ilmu agama Islam, ilmu ketertiban cara Islam.

Segala sesuatunya itu akan menyampaikan maksudnya, tetapi sekali-kali tiada boleh menyalahi undang-undang tanah disisi dan tiada boleh melanggar keamanan atau ketertiban.

Artikel 4

Sekutunya persarikatan itu, yaitu: sekutu biasa dan donateur atau pemberi derma. Sekutu biasa itu hanyalah orang-orang yang beragama Islam di Hindia Nederland saja. Supaya orang boleh menjadi sekutu, cukuplah jika ia melahirkan permintaannya saja kepada bestuur.

Orang berhenti daripada jadi sekutu, jika ia mintaberhenti atau jika dilepas oleh keputusan perkumpulan umum, yaitu menurut suara terbanyak.

Berapa banyaknya uang pemberiannya donateur dan contributienya sekutu dan bagaimana caranya memungut segala uang itu diatur dalam undang-undnag kecil (Huishoudelijk Reglement).

Artikel 5

Jalannya pekerjaan persyarikatan itu ada didalam tangan Hoofbestuur, yang sekurang-kurangnya ada 9 orang lidnya, terpilih dari pada sekutu perserikatan itu. Hoofbestuur boleh menambahhi banyaknya lidnya itu menurut keperluannya: hal ini akan disahkan dalam perkumpulan umum tahunan.

Artikel 6

Hoofbestuur dipilih dalam perkumpulan umum dengan suara yang sungguh-sungguh terbanyak. Lamanya jadi Hoofbestuur tiada lebih dari tiga tahun, serta berhenti bersama-sama, tetapi ketika itu juga boleh dipilih lagi.

Artikel 7

Jikalau didalam sebuah tempat di residensi Yogyakarta ada sekutu perhimpunan ini lebih dari 10 Orang, bolehlah disitu diadakan afdeeling perhimpunan itu, dikepalai oleh bestuur afdeeling itu sendiri.

Artikel 8

Segala keputusan dalam perkumpulan umum haruslah bergantung pada suara yang sungguh-sungguh lebih banyak diantara sekutu yang hadir dan memang berhak mempunyai suara. Keputusan itu haruslah dimaklum kepada segala sekutunya didalam tempo sebulan lamanya. Sebelum dibatalkan pula dalam perkumpulan umum, segala keputusan itu selalu ada kekuasaanya.

Artikel 9

Sarat perhimpunan itu yang berupa uang yaitu :

- a. Dari pada contributie sekutu biasa;
- b. Dari pada derma donateur;
- c. Dari pada harta pusaka, anugerah pemberian, dan mana-mana yang datangnya tiada disangka-sangka angka, dan:
- d. Dari pada keuntungan, yang timbul dari pada barang kepunyaan perhimpunan.

Artikel 10

Keputusan yang hendak mengubah statuent ini, supaya hendaklah ada suara yang lebih yaitu 3/4-nya segala sekutu yang hadir, lagi berhak mempunyai suara, serta datangnya itu memang dipanggil akan membicarakan perkara itu.

Artikel 11

Perhimpunan itu dipandang tiada lagi oleh pengadilan, jikalau sekutunya berkurang-kurang sampai tingga kurang dari pada duapuluh lima orang.

Perhimpunan itu boleh diberhentikan pada sembarang waktu asal hal itu diputuskan dalam perkumpulan umum dan yang setuju sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ -nya segala suara yang ada hadir pada waktu itu.

Artikel 12

Segala uang dan lain-lain kepunyaan perhimpunan itu, yang ada pada ketika perhimpunan itu diberhentikan, jatuh kepada wakaf-wakaf dan masjid-masjid, yaitu menurut bunyi Burgelijk awetboek Hindia Nederlan fasal 1665, yang akan diberi itu ditentukan oleh perkumpulan umum yang kemudian sekalai, yaitu yang memutuskan hal matinya perhimpunan itu.

Sumber : M.H. Djalan Badawi, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah 1912-1985*, Yogyakarta Sekretariat Pimpinan Pusat Muhammadiyah.



Lampiran 5. *Gouvernements Besluit* No 81 tanggal 22 Agustus 1914.

1 a.

SALINAN

ALGEMEENE SECRETARIE

, den 22 sten Augustus 1914.-

No. 81.-

Gelezen:

- I. het request, gedagteekend Djokjakarta 20 Desember 1912 van Hadji Ahmad Dahlan en Hadji Abdoellah Sirat, respectievelijk Voorzitter en Secretaris en als zoodanig ten deze gemachtigden van de aldaar voor den tijd van 29 jaar opgerichte vereeniging "Mohammadiyah";
 - II. de missives van den Resident van Djokjakarta van 21 April 1913 en 30 Juni 1914 Nos. 4073/21a en 7624/21a, de laatste gericht tot den Directeur van Justitie;
 - III. de rapporten van dien Departementschef van 19 Maart en 20 Juli 1914 Nos. 13 en 3 en het overgelegd schrijven van den Adviseur voor Inlandsche Zaken van 26 Januari t.v. No. 20;
- Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van het Koninklijk Besluit van 28 Maart 1870 No. 2 (Staatsblad No. 64), zooals het in gewijzigd bij dat van 30 Juni 1898 No. 24 (Staatsblad No. 242) en aangevuld bij dat van 14 Mei 1913 No. 37 (Staatsblad No. 432);

Is goedgevonden en verstaan:

De statuten der vereeniging "Mohammadiyah" te Djokjakarta, gelijk die, gewijzigd op de algemeene vergadering van 15 Juni 1914, in de nader overgelegde bijlage van het verzoekschrift zijn omschreven, goed te keuren en die vereeniging mitsdien als rechtspersoon te erkennen.

Afschrift dezes zal worden gezonden aan den Raad van Nederlandsch-Indie tot informatie en extract verleend aan den Directeur van Justitie, den Resident van Djokjakarta, den Adviseur voor Inlandsche Zaken en de adressanten tot informatie en naricht.

Disalin sesuai dengan aselinya dari arsip Nasional
oleh: Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta

(H.Mh. Badawati)

1 b.

TERJEMAHAN.

SEKRETARIAT NEGARA

22 Agustus 1914

No.81

Membaca:

- I. Surat permohonan tertanggal Yogyakarta 20 Desember 1912 dari Haji Ahmad Dahlan dan Haji Abdullah Sirat, masing-masing dan berturut-turut adalah Ketua dan Sekretaris dan dalam hal ini bertindak atas kuasa dari Persyarikatan Muhammadiyah, yang didirikan untuk 29 tahun lamanya;
- II. Surat-surat dari Residen Yogyakarta tertanggal 21 April 1913 dan 30 Juni 1914 nomor 4073/21a dan 7624/21a, yang terakhir ditujukan kepada Direktur Departemen Kehakiman;
- III. Laporan dari Direktur Departemen Kehakiman tertanggal 19 Maret dan 20 Juli 1914 nomor 13 dan 3, serta mendapat persetujuan dari Penasehat untuk Urusan Hindia Belanda tanggal 26 Januari 1914 nomor 20;

Mengingat Pasal 1, 2 dan 3 dari Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 28 Maret 1870 No.2 (Lembaran Negara No.64) seperti telah diubah dengan Keputusan tanggal 30 Juni 1898 No.24 (Lembaran Negara No.242) dan disempurnakan dengan Keputusan tanggal 14 Mei 1913 No.37 (Lembaran Negara No.432);

Memperkenankan dan memaklumkan:

Bahwa Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta, sama seperti yang telah diubah dalam Rapat Anggota tanggal 15 Juni 1914, seperti yang terlampir pada surat permohonan tersebut, disahkan dan karena itu menyetujui dan memperkenankan Persyarikatan itu sebagai Badan Hukum.

Salinan dari surat keputusan ini dikirimkan kepada Dewan Hindia Belanda untuk diketahui seperlunya dan kutipannya disampaikan kepada Direktur Departemen Kehakiman, Residen Yogyakarta, Penasehat untuk Masalah Hindia Belanda dan lain-lain yang berkepentingan.

Diterjemahkan oleh H. Mh. Djaldan Badawi
Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta

Sumber : M.H. Djalan Badawi, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah 1912-1985*, Yogyakarta Sekretariat Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Lampiran 6. *Gouvernements Besluit* No 40 tanggal 16 Agustus 1920.

2 a.

SALINAN

,den 16den Augustus 1920.-

No. 40.-

Gelezen:

- I. het verzoekschrift, gedagteekend Djokjakarta 20 Mei 1920, van Hadji Achmad Dahlan en Djojosoegito, onderscheidenlijk voorzitter en secretaris en als zoodanig ten deze gemachtigden van de bij besluit van 22 Augustus 1914 No. 81 als rechtspersoon erkende vereeniging "Mohammadiyah";
- II. het verslag van den Directeur van Justitie van 10 Juli 1920 No. B 27/28/1; en het overgelegd schrijven van den wd. Adviseur voor Inlandsche Zaken van 24 Juni t.v. No.204;

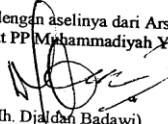
Gelet op artikel 4 van het Koninklijk besluit van 28 Maart 1870 No.2/Staatsblad No. 64/;

Is goedgevonden en verstaan:

Goedkeuring te verleen en op de wijziging van artikel 2 der statuten van de vereeniging "Mohammadiyah" te Djokjakarta, gelijk die in het verzoekschrift is omschreven.

Uittreksel dezes zal worden verleend aan den Directeur van Justitie, den wd. Adviseur voor Inlandsche Zaken en de verzoekers tot inlichting en naricht.

Disalin sesuai dengan aselinya dari Arsip Nasional
 oleh: Sekretariat PPM Muhammadiyah Yogyakarta


 (H.Mh. Djaldan Badawi)

TERJEMAHAN

2 b.

PETIKAN dari Surat Keputusan Gubernur Jenderal
Hindia Belanda

Batavia, 16 Agustus 1920 (No. 40)

Membaca :

I. Surat permohonan tertanggal Yogyakarta 20 Mei 1920 dari Haji Ahmad Dahlan dan Djojosoegito, masing-masing dan berturut-turut adalah Ketua dan Sekretaris dan dalam hal ini bertindak atas kuasa dari Persyarikatan Muhammadiyah, yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum tanggal 22 Agustus 1914 No.81;

II. dan sebagainya;

Memperhatikan Pasal 4 dari Surat Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 28 Maret 1870 No.2 (Lembaran Negara No.64);

Memperkenankan dan memaklumkan:

Mengesahkan perubahan Pasal 2 Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta, seperti tersebut pada lampiran surat permohonan.

Kutipan dan sebagainya.

Diundangkan oleh Wakil Ketua Mahkamah Hindia Belanda,
dalam keadaan Gubernur Jenderal berhalangan.

Sekretaris Negara
CH. WELTER

Bunyi perubahan Pasal 2:

Persyarikatan bertujuan:

- a. Meningkatkan pelajaran dan pengajaran Agama Islam di Hindia Belanda.
- b. Meningkatkan kehidupan beragama bagi anggotanya.

Diterjemahkan oleh H. Mh. Djaldan Badawi
Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta

Sumber : M.H. Djaldan Badawi, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah 1912-1985*, Yogyakarta Sekretariat Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Lampiran 7. *Gouvernements Besluit* No 36 tanggal 2 September 1921.

3 a.

SALINAN

UITTREKSEL uit het Register der Besluiten van den
Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie

Batavia, den 2den September 1921. (No.36)

Gelet enz.;

Gelezen:

I. her verzoekschrift, gedagteekend Djokjakarta, 7 Mei 1921 van Hadji Ahmad Dahlan en Mas Djojosoegito, onderscheidenlijk voorzitter en secretaris en als zoodanig ten deze gemachtigden van de bij besluit van 22 Augustus 1914 No. 81 als rechtspersoon erkende vereeniging: "Mohammadjah" aldaar;

II. enz.

Nog gelet op artikel 4 van het Koninklijk besluit van 28 Maart 1870 No. 2 (staatsblad No.64);

Is goedgevonden en verstaan:

Goedkeuring te verleen op de wijziging der artikelen 4, 5 en 7 (*) der statuten van de vereeniging "Mohammadjah" te Djokjakarta, gelijk die wijziging in het verzoekschrift is omschreven.

Uittreksel enz.

Ter ordonantie van den Gouverneur Generaal
van Nederlandsch-Indie.
De Algemeene Secretaris,

CH. WELTER

(*) Luidende thans als volgt:

Artikel 4 : De leden der vereeniging bestaan uit gewone leden, eereleden en donateurs of begunstigers. Gewone leden kunnen slechts zijn Mohammedanen in Nederlandsch-Indie. Het lidmaatschap wordt verkregen door enkele aangifte bij het bestuur.

Men verliest het lidmaatschap der vereeniging of royement, krachtens besluit der algemeene vergadering, genomen met meerderheid van stemmen.

Tot eereleden kunnen door de algemeene vergadering op voorstel van het bestuur worden benoemd zij, die zich bijzonder verdienstelijk jegens de vereeniging hebben gemaakt.

Donateur kan ieder zijn, zonder onderscheid van godsdienst of landraad, terwijl ook als rechtspersoon erkende vereeniging en lichamen als donateurs der vereeniging kunnen worden aangenomen.

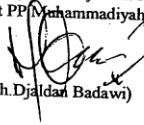
De bijdrage van donateurs en de contributie der leden, als mede de wijze van inning worden bij huishoudelijk reglement geregeld.

Artikel 5 : Het bestuur der vereeniging berust in handen van een hoofdbestuur bestaande uit ten minste 9, uit de leden der vergadering gekozen leden.

Het Hoofdbestuur kan zich naar behoefte aanvullen met nieuwe leden, onder andere goedkeuring der jaarlijksche algemeene vergadering.

Artikel 7 : Wanneer op een plaats in Nederlandsche-Indie meer dan 10 leden der vereeniging woonachtig zijn, kan aldaar een afdeling der vereeniging worden gevormd, welke onder en eigen afdeeliningsbestuur zal komen te staan.

Disalin sesuai dengan aselinya dari Arsip Nasional
oleh: Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta


(H.Mh. Djaldan Badawi)

3 b.

TERJEMAHAN

PETIKAN dari Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda.

Batavia, 2 September 1921 (No.36)

Memperhatikan dan sebagainya;

Membaca : I. Surat permohonan tertanggal Yogyakarta 7 Mei 1921 dari Haji Ahmad Dahlan dan Mas Djojosoegito, masing-masing dan berturut-turut adalah Ketua dan Sekretaris dan dalam hal ini bertindak atas kuasa dari Persyarikatan Muhammadiyah yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum tanggal 22 Agustus 1914 No.81;

II. Dan sebagainya;

Memperhatikan lagi Pasal 4 dari Surat Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 28 Maret 1870 No.2 (Lembaran Negara No.64);

Memperkenankan dan memaklumkan:

Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta Pasal 4, 5 dan 7 (*), seperti tertulis pada surat permohonan tersebut.

Salinan dan sebagainya.

Diundangkan oleh
Gubernur Jenderal Hindia Belanda
Sekretaris Negara

CH.WELTER

(*) Bunyi perubahan Anggaran Dasar sebagai berikut:

Pasal 4 : Anggota Persyarikatan terdiri dari: Anggota biasa, Anggota Kehormatan, dan Penyokong.
Anggota biasa terdiri dari orang Islam di Hindia Belanda.
Tanda keanggotaan diberikan oleh Pengurus Besar atas permintaan masing-masing calon anggota.
Seseorang kehilangan keanggotaannya karena dipecat atas keputusan Rapat Anggota, yang diambil dengan suara terbanyak.
Anggota Kehormatan diusulkan oleh Pengurus Besar kepada Rapat Anggota, atas jasanya yang besar terhadap Persyarikatan.
Ketentuan tentang Penyokong dan besarnya uang iuran anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 5 : Anggota Pengurus Besar terdiri dari sedikitnya 9 orang, yang dipilih dalam Rapat Anggota.
Pengurus Besar dapat menambah anggotanya, kemudian disahkan dalam Rapat Anggota Tahunan.

Pasal 7 : Apabila di suatu tempat di Hindia Belanda terdapat 10 orang anggota atau lebih, di situ dapat didirikan Cabang dan dibentuk Pengurusnya.

Diterjemahkan oleh: H.Mh.Djaldan Badawi Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta.

Sumber : M.H. Djaldan Badawi, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah 1912-1985*, Yogyakarta Sekretariat Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Lampiran 8. Rechtpersoon Muhammadiyah

4

SALINAN

Keterangan hal: RECHTSPERSOON MUHAMMADIYAH

Berhubung soal rechtspersoon Muhammadiyah itu dalam beberapa urusan dengan Pemerintah sering diminta keterangannya - karena Pemerintah kita sekarang ini dalam banyak hal termasuk dalamnya hal rechtspersoon masih memakai dan melanjutkan undang-undang, peraturan-peraturan lama (Hindia Belanda) -, maka perlu kami cantumkan keterangannya sbb.:

Muhammadiyah mendapat besluit:

1. Gouvernement besluit 22 Augustus 1914 No. 81; diubah dengan
2. Gouvernement besluit 16 Augustus 1920 No. 40, diubah dengan
3. Gouvernement besluit 2 September 1921 No. 36.

Pada ketika akan dimintakan rechtspersoon lagi, karena sudah habis waktunya (29 tahun), didapat keterangan dari tuan Mr. Twysel dan Tuan Mr. R.P. Notosoesanto (kedua-duanya di Departement van Justitie pada ketika itu) bahwa wet yang mengharuskan demikian telah diubah dengan yang baru sebagai berikut:

RECHTSPERSOONLIJKHEID VAN VEREENIGINGEN

K.B. van 28 Maart Stb. 70 - 64 Art. 5a

(Ingev. Stb. 33 - 80)

Vereenigingen voor bepaaldentijd aangegaan, waarvan de statuten of reglement zijn goed-gekeurd, worden ook na aflopen van het in die statuten of reglementen aangegeven tijdvak zonder nadere goedkeuring als rechtspersoon aangemerkt, indien en voor zoo lang uit handelingen of gedragingen van de leden of het bestuur der Vereeniging blijkt, dat de vereeniging na evenbedoeld tijdstip is blijven bestaan.

Jang menurun:

Mr. R. Moeljatno, Griffier Mahkamah Islam Tinggi, dengan petunjuk Mr. R.P. Notosoesanto (Dep. Justitie)

Persjarikatan - persjarikatan jang diadakan selama waktu jang telah ditentukan jang statuten dan reglementnja telah diaku shah, maka sehabis waktu jang disebutkan didalam statuten dan reglementen itu, persjarikatan itu dianggap sebagai persoon, tidak usah dengan goedkeuring (pengeshahan) lebih djauh, apa- bila dan selama terbukti dari perbuatan dan tabi'at (kelakuan) dari anggauta-anggauta dan bestuur persjarikatan itu, bahwa sehabis waktu tersebut persjarikatan berlangsung adanja.

Jang menjalin:

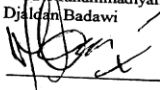
R. Oesmanhadji

Maka tetaplah Muhammadiyah berrechtspersoon dengan rechtspersoon yang sudah dan berlaku hingga sekarang ini, sebelum ada wet/undang-undang yang merobahnya.

Demikian harap menjadi pegangan dan maklum.

PUSAT PIMPINAN MUHAMMADIYAH

Disalin sesuai dengan aselinya oleh:
Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta
td. Mh. Djalal Badawi



10

Sumber : M.H. Djalal Badawi, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah 1912-1985*, Yogyakarta Sekretariat Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Lampiran 9. Jumlah Jamaah Haji Indonesia 1879-1939.

96

Lampiran 1

JAMAAH HAJI INDONESIA
1879 - 1939

Tahun Hijriah	Tahun Masehi		Jamaah Indonesia	Jamaah Dunia
1296	1879	(26-12-78 - 15-12-79)	5.331	—
1297	1880	(15-12-79 - 4-12-80)	9.542	59.659
1298	1881	(4-12-80 - 23-11-81)	4.605	37.785
1299	1882	(23-11-81 - 12-11-82)	4.302	25.580
1300	1883	(12-11-82 - 2-11-83)	5.269	27.263
1301	1884	(2-11-83 - 21-10-84)	4.640	31.157
1302	1885	(21-10-84 - 10-10-85)	4.692	59.010
1303	1886	(10-10-85 - 30-11-86)	2.523	42.374
1304	1887	(30-11-86 - 19-11-87)	2.426	42.185
1305	1888	(19-11-87 - 7-11-88)	4.328	50.221
1306	1889	(7-11-88 - 28-8-89)	3.146	44.686
1307	1890	(28-8-89 - 17-8-90)	5.419	39.186
1308	1891	(17-8-90 - 7-8-91)	6.044	45.476
1309	1892	(7-8-91 - 26-7-92)	6.841	54.491
1310	1893	(26-7-92 - 15-7-93)	8.092	90.173
1311	1894	(15-7-93 - 5-7-94)	6.874	49.628
1312	1895	(5-7-94 - 20-6-95)	7.120	57.593
1313	1896	(24-6-95 - 12-6-96)	11.788	62.726
1314	1897	(12-6-96 - 2-6-97)	7.075	41.133
1315	1898	(2-6-97 - 22-5-98)	7.895	38.247
1316	1899	(22-5-98 - 12-5-99)	7.694	36.380
1317	1900	(12-5-99 - 1-5-00)	5.068	—
1318	1901	(1-5-00 - 20-6-01)	7.421	—
1319	1902	(20-6-01 - 10-6-02)	6.092	—
1320	1903	(10-6-02 - 30-3-03)	5.679	—
1321	1904	(30-3-03 - 19-3-04)	9.481	74.344
1322	1905	(18-3-04 - 8-3-05)	4.962	66.451
1323	1906	(8-3-05 - 25-2-06)	6.863	68.735
1324	1907	(25-2-06 - 14-2-07)	8.694	108.305
1325	1908	(14-2-07 - 4-2-08)	9.319	91.142
1326	1909	(4-2-08 - 23-1-09)	10.300	69.077
1327	1910	(23-1-09 - 13-1-10)	10.994	71.421
1328	1911	(13-1-10 - -11)	14.234	90.051

Sumber: Aqip Suminto, *Politi Islam Hindia Belanda*, (Jakarta : LP3ES, 1996).



<i>Tahun Hijrah</i>	<i>Tahun Masehi</i>		<i>Jamaah Indonesia</i>	<i>Jamaah Dunia</i>
1329	1911	(- -11 - 20-12-11)	24.025	83.749
1330	1912	(20-12-11 - 11-12-12)	18.353	83.295
1331	1913	(11-12-12 - 30-11-13)	26.321	96.924
1332	1914	(30-11-13 - 19-11-14)	23.427	56.855
1333	1915	(19-11-14 - 9-11-15)	---	---
1334	1916	(9-11-15 - 28-10-16)	---	---
1335	1917	(28-10-16 - 17-10-17)	27	8.585
1336	1918	(17-10-17 - 7-10-18)	48	7.020
1337	1919	(7-10-18 - 26-11-19)	1.125	22.101
1338	1920	(26-11-19 - 15-11-20)	14.805	59.370
1339	1921	(15-11-20 - 4-11-21)	28.795	60.786
1340	1922	(4-11-21 - 24- 8-22)	22.412	---
1341	1923	(24- 8-22 - 14- 8-23)	12.022	86.353
1342	1924	(14- 8-23 - 2- 8-24)	39.800	91.783
1343	1925	(2- 8-24 - 22- 7-25)	74	---
1344	1926	(22- 7-25 - 12- 7-26)	3.474	57.957
1345	1927	(12- 7-26 - 1- 7-27)	52.412	123.052
1346	1928	(1- 7-27 - 20- 6-28)	43.062	98.635
1347	1929	(20- 6-28 - 9- 6-29)	31.405	86.021
1348	1930	(9- 6-29 - 29- 5-30)	33.214	84.810
1349	1931	(29- 5-30 - 19- 5-31)	17.052	40.105
1350	1932	(19- 5-31 - 7- 5-32)	4.385	29.065
1351	1933	(7- 5-32 - 26- 6-33)	2.260	20.026
1352	1934	(26- 6-33 - 16- 6-34)	2.854	25.252
1353	1935	(16- 6-34 - 5- 6-35)	3.693	33.898
1354	1936	(5- 6-35 - 24- 3-36)	4.012	33.730
1355	1937	(24- 3-36 - 14- 3-37)	5.403	49.864
1356	1938	(14- 3-37 - 3- 3-38)	10.327	67.224
1357	1939	(3- 3-38 - 20- 2-39)	10.883	59.543

Sumber: Aqib Suminto. Politik Islam Hindia Belanda. Jakarta: LP3ES, 1996. hlm
222-223.

Lampiran 10. Kabar Meninggalnya K.H. Ahmad Dahlan.

— 74 —

Meneroet boenjinja karangan jang terseboet dimana bahagian. b. diatas itoe, soedah njatalah, bahwa padoeke Kejai Hasjim itoe, tida mengarti benar - benar kepada adanya perserikatan Moehammadijah jang sedjatinja. Sebab bila dibandingkan karangan Kejai Hasjim dengan Soewara Moehammadijah no. 12 tahoen jang baroe lahe itoe, terangelah padoeke Kejai Hasjim itoe hanja ngawoer belaka, atas pemandangannya kepada Moehammadijah.

Sekarang bagimana jang sabenernja? Padoeke Kejai Hasjim itoe seorang Oelama, jang termasuk golongan oelama besar, tetapi pemandangannya keada Moehammadijah soedah njata keliroenja, sedang M D. itoelah sneatoe perserikatan di tanah Djawa, jang berdekatan dengan tempat tinggalnja P. K. Hasjim, bilamana di timbang dengan tempat S. Ibnu Taimijah dan S. Moehammad Abdoeh dan Rasjid Ridlo. Apakah pendakwaan P. K. Hasjim itoe soedah benar dan tida keliroe? Meneroet kitab - kitab jang dikarangkan oleh sekalian Oelama terseboet diatas ini, njatalah kekeliroeannya K. Hasjim itoe. Sebab dari pengataoean saja, jang saja soedah selidiki benar - benar apa jang terseboet didalam kitabnja S. Ibnu Taimijah, S. Moehammad Abdoeh, S. Rasjid Ridlo dan sebaginja, soenilah dari keterangan mengharakan Ziarah Qoebornja Rasoeloellah, tetapi menetapkan kesoenatannja, asal sahaja meneroet tjaranja Ziarah jang di lakoean oleh Rasoeloellah ketika masih hidoepnja, djadi tida ziarah B'ah.

Sekarang soedah njatalag pada kita, bahwa toedoehan² sekalian Kejai partjinja K. Hasjim kepada Moehammadijah, itoelah toedoehan jang tita sah dan tiada benar semoeanja, melainkan dengan kira-kira atau dgri pekabaran orang jang tida taje kepada Moehammadijah. Hal kekeliroean K. Hasjim ini, soedah bolih diboet boekti akan kesoeetjian Moehammadijah, dan sebaliknja, bolih boet boekti, bahwa sekalian oelama

jang mendakwa kepada Moehammadijah dengan toedoehan jang tida baik itoe, djoesta belaka, tjaankanlah peubatja S. M.

Wasalam

MOESLIM

Madoera.



Inna lillahi wainna ilaihi radji'oen.

Dengan hati jang sedih kami beri tahoean pada saudara-saudara teroetama kaoem Moehammadijah dan Sarikat Islam, bahwa pada hari Djumoeah menghadap malam Saptoe 23/24 Februari 1923 kira poekoel 11-45 n. Kejahi Achmad Dachlan Ketib Ann, keloea dari perserikatan Moehammadijah dan Adviseur Centraal Sarikat Islam telah berpoeatang kerachmatoellah.

Dari pada itoe, marilah kita bersama-sama memoeedji kepada Allah moedah-moe.

Lampiran 11. Motie Perserikatan Muhammadijah

“Motie Perserikatan”

Kerapatan oemoem Moehammadijah, bersidang di Djogjakarta pada hari Ahad tanggal 1 April 1923.

Mendengarkan oeraian dari hal kewadjiban penjiaran pengadjaran ‘ilmoe agama Islam, istimewa diantara oemmat Islam jang masih sangat kekoerangan pengetahuan jang njata dan sedjatinja tentang agamanya itoe;

Mendengar lagoe oeraian tentang kesempitan djalan di Hindia ini akan melakoekan kewadjiban jang perloe oentoek keselamatan dan kesedjahteraan ra’iat Hindia, jang oemoemnja beragama Islam, ketjoeali sebahagian jang amat sedikit;

Mengakoe dan menjaksikan bahwa salah satoe perkara jang mendjadi alangan menjempitkan djalan itoe ialah peratoeran negeri jang dinamakan goeroe ordonnantie, jaitoe terkandoeng dalam Staatsblad 1905 No. 550 dan Bijblad No. 6363;

Mengingat poela poetoesan-poetoesan Congres al-Islam di Tjirebon boelan October jang laloe dan Congres Centraal Sarekat Islam di Madioen pada boelan Februari jang laloe, meminta tjaboetnja peratoeran itoe;

Memoetoeskan:

Bahwa semestinjaalah oemmat Islam di Hindia diberikan kelonggaran jang setjoekoepnja oentoek menjiarkan pengadjaran agama Islam; dan

Mempersilahkan Hoofdbestuur Moehammadijah akan melakoekan daja oepaja jang patoet berhadapan dengan Pemerintah (Belanda), soepaja peratoeran goeroe ordonnantie itoe ditjaboet dan diberi peratoeran baroe, jang memberi kelapangan bagi pengadjaran Islam jang sedikitnja sama dengan pengadjaran lain-lain kejakinan, baik jang berasas pada agama maoepoen jang berasas pada theorie doeniawi.

Sumber : *Soeara Moehammadijah*/th. ke-4/Nomor 5 dan 6/1923.